



Dewan Klarifikasi Pemkot Soal Kenaikan PBB

■ Sayangnya Tak Ada Sosialisasi

YOGYA, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta bakal segera meminta klarifikasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini lantaran banyaknya warga masyarakat yang mengeluhkan kenaikan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro.

Ia mengatakan selama ini pihaknya memang sudah jauh-jauh hari menerima keluhan dari masyarakat terkait kenaikan PBB di Kota Yogyakarta. Namun belum bisa meminta klarifikasi dari Pemkot Yogyakarta karena dalam masa reses.

"Selama masa reses kami terima banyak sekali keluhan masyarakat. Kami juga membandingkan PBB tahun 2019 dan 2020, dan kenaikannya tinggi sekali. Pemkot juga belum berkonsultasi dengan kami, maka secepatnya kami un-

dang," katanya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Selasa (18/2).

"Masa reses kan enam hari, Rabu (19/02) terakhir. Setelah pembukaan sidang, Kamis (20/2) nanti akan langsung kita panggil Pemkot untuk klarifikasi," sambungnya.

Ia menyayangkan tindakan Pemkot Yogyakarta yang menaikkan PBB tanpa sosialisasi. Selama reses sejak tanggal 14 Februari lalu, ia telah datang ke beberapa kelurahan, dan belum ada sosialisasi dari Pemkot Yogyakarta.

"Kemarin sudah tanya ke kelurahan-kelurahan, memang tidak ada sosialisasi. Apalagi yang rumah di pinggir jalan, kenaikannya tinggi sekali. Kalau sebelumnya ada sosialisasi kan tidak akan membuat kegaduhan seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta

CARI JALAN KELUAR

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta bakal meminta klarifikasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Untuk saat ini legislatif belum bisa meminta klarifikasi dari Pemkot Yogyakarta karena masa reses.
- Pemanggilan direncanakan Kamis (20/2).
- Dewan menyayangkan kenaikan PBB tanpa sosialisasi.
- Pemkot juga masih mencari jalan keluar untuk kenaikan PBB di Kota Yogyakarta.

masih mencari jalan keluar untuk kenaikan PBB di Kota Yogyakarta.

"Baru dirapatkan, sebenarnya kan kebijakan itu tiga tahun ada penyesuaian. Kita sudah tiga tahun lebih. Kita sudah kaji dengan tiga komponen, yaitu transaksi berjalan, nilai zona yang ditetapkan BPN, dan harga penawaran. BPKAD pernah menghitung, kenaikan bisa sampai 700 persen. Tinggi sekali," katanya.

"Lalu coba nilai penawaran kita nol kan. Jadi yang dihitung transaksi berjalan (jual beli tanah) dan nilai

zona dari BPN. Ternyata masih tinggi juga. Karena harga tanah di Kota Yogyakarta ini memang mahal sekali," sambungnya.

Warga yang Keberatan membayar PBB pun boleh mengajukan pengurangan. Pihaknya akan segera mencari alternatif, agar PBB di Kota Yogyakarta teratasi. "Sebenarnya PBB yang dibayarkan itu juga tidak seluruhnya, sudah kita kurangi. Pemkot membuka kalau ada warga yang Keberatan. Sedang kita bicarakan supaya tidak tinggi sekali," jelasnya. **(maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005